



KMS Jangan Sampai Salah Target

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya untuk tidak salah sasaran dalam memberikan kartu menuju sejahtera (KMS). Sehingga, pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta benar-benar bisa berjalan efektif.

Divisi pemantauan dan investigasi Forpi, Baharudin Kamba menjelaskan, pihaknya menyortir masih banyaknya KMS yang tak tepat sasaran. Selain itu, banyak pula modus warga yang masuk di KMS untuk kepentingan mencari sekolah negeri.

"Ada yang menerima tapi pakai perhiasan banyak. Banyaknya KMS yang tidak tepat sasaran ini membutuhkan evaluasi dan verifikasi yang cermat

Maka, survei ini juga benar-benar harus dilakukan. Jangan sampai ada warga kurang mampu yang tercecer dari data KMS

dari Pemkot setempat," ujar Kamba, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, selama ini, KMS memang sangat diperlukan untuk salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Namun,

jika tidak didata secara akurat maka akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

Di antaranya, banyak pula warga yang akan mengadakan persoalan tidak tepat sasaran KMS yang dianggarkan melalui APBD Kota Yogyakarta. Selain itu, dampak sosial juga akan terjadi pada warga karena yang seharusnya menerima, namun tidak menerima.

"Maka, survei ini juga benar-benar harus dilakukan. Jangan sampai ada warga kurang mampu yang tercecer dari data KMS," katanya.

Sementara itu, sejumlah warga mengeluhkan distribusi KMS yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Bahkan, ditengarai adanya broker dalam peng-

● ke halaman 14

KMS Jangan Sampai Salah

● Sambungan Hal 13

rusan KMS ini, sehingga banyak warga yang mampu justru menerima program untuk pengentasan kemiskinan ini.

Hal itu dikemukakan oleh Mintarti (43), warga RT 14 RW 03, Kampung Penumpang, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, menyatakan, sejauh ini pendistribusian KMS masih belum merata.

Menurut Mintarti yang mengaku sebagai supplier makanan untuk angkringan itu, banyak warga yang seharusnya pantas menerima KMS. Namun, justru tercecer dari bantuan ini. Hal ini lantaran ada beberapa

orang yang justru memasukkan para penerima KMS secara subjektif.

Beberapa kali, Mintarti bahkan dimintai tolong oleh tetangganya yang kurang mampu untuk mengurus KMS.

Dia mengaku beberapa kali mengurus ke kantor Pemkot setempat dengan dasar kemanusiaan. Apalagi, banyak warga yang kesulitan dalam membiayai pendidikan dan kesehatan.

"Kalau hanya dimanfaatkan segelintir orang mampu dan punya penghasilan tetap, apa gunanya pemerintah memberikan indikator-indikator penerima KMS," tegasnya.

Dia berharap pada pemerintahan di bawah wali kota yang terpilih dapat semakin meratakan pendistribusian KMS. Sehingga, tak ada lagi

warga kurang mampu yang tercecer dari daftar KMS. Selain itu, dia berharap program pengentasan kemiskinan dari Pemkot bisa benar-benar berjalan efektif. "Tak ada lagi kesenjangan dan pembagian KMS yang tidak merata," tandasnya.

Sesuai prosedur

Kepala Dinas Sosial Kota Yogya, Hadi Muhtar menjelaskan, pihaknya telah menetapkan data penerima Kartu Menuju Sehat (KMS) dengan verifikasi. Verifikasi itu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ditetapkan berdasarkan indikator.

Menurutnya, penerima KMS ini bukan berdasarkan subjektivitas. Namun, harus benar-benar dinilai secara objektif melalui survei yang dilakukan oleh petugas independen. "Tidak ada per-

timbangan dekat dengan seseorang sehingga menentukan lolos atau tidaknya seseorang menerima KMS," ujar Hadi.

Dia menyatakan seseorang yang merasa tidak mampu dan tidak lolos dalam menerima KMS bisa mengecek nilai verifikasinya di dinas sosial. Menurut Hadi, sepanjang memenuhi kriteria dan nilainya memenuhi, maka seseorang akan menerima KMS.

Pihaknya pun mengatakan, keluhan terkait dengan KMS ini bisa dilaporkan melalui keluhan masing-masing. Nantinya akan ada musyawarah kelurahan terkait verifikasi tersebut. "Kami bisa menerima aduan. Nanti bisa lewat lurah atau RW yang sebelumnya mengusulkan," ujarnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005